

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada bulan Oktober, pola stabilisasi yang dimulai pada akhir September berlanjut menjadi kenaikan tipis pada Indeks Perkembangan Harga (IPH). Komoditas beras dan minyak goreng mulai mengambil peran sebagai penyumbang kenaikan harga utama, menggantikan tren penurunan hortikultura pada triwulan sebelumnya. Meskipun harga cabai dan bawang masih relatif stabil di minggu pertama, mulai terjadi kontraksi pasokan di minggu ke-4 yang memicu kenaikan harga eceran akibat berkurangnya hasil panen lokal di wilayah sentra produksi Pulang Pisau.

Memasuki bulan November, tekanan inflasi semakin nyata, terutama pada kelompok protein hewani seperti daging ayam ras dan telur ayam ras. Kenaikan harga pakan ternak di tingkat nasional mulai berdampak pada harga jual di pasar lokal, dengan kontribusi kenaikan IPH tercatat berkisar antara 0,5 hingga 0,8 poin secara konsisten setiap minggunya. Selain itu, bawang merah kembali muncul sebagai komoditas volatil karena ketergantungan pada pasokan luar daerah yang mulai terhambat oleh frekuensi hujan yang tinggi, yang mengganggu jalur distribusi darat.

Pada bulan Desember, terjadi lonjakan permintaan (demand-pull inflation) yang signifikan terkait momentum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Komoditas daging sapi, beras premium, dan cabai rawit menjadi pendorong utama inflasi di seluruh pekan. Selain barang kebutuhan pokok, sektor jasa khususnya transportasi dan akomodasi juga menunjukkan kenaikan tarif, yang menambah beban tekanan IPH di akhir triwulan.

Secara umum, Triwulan IV 2025 ditandai dengan berakhirnya periode harga murah hortikultura dan beralihnya beban inflasi pada komoditas pangan pokok serta jasa transportasi. Risiko yang perlu diwaspadai ke depan meliputi:

- Anomali Cuaca: Curah hujan ekstrem berpotensi mengganggu distribusi logistik pangan melintasi Trans-Kalimantan dan memicu gagal panen pada tanaman hortikultura lokal.
- Volatilitas Harga Pangan Impor: Ketergantungan pada pasokan luar daerah (seperti telur dan bawang) membuat Kabupaten Pulang Pisau rentan terhadap fluktuasi harga di tingkat distributor provinsi.
- Efek Musiman Awal Tahun: Pasca-Nataru, risiko kenaikan harga beras perlu dimonitor ketat mengingat masa tanam baru dimulai, sehingga stok cadangan pangan pemerintah (SPHP) menjadi kunci stabilitas harga di pasar.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Oktober

- Transisi Musim Tanam: Penurunan debit air yang berlanjut dari September mulai mengganggu fase awal tanam hortikultura lokal, memicu kenaikan harga pada cabai dan sayuran daun.
- Harga Minyak Goreng: Terjadi penyesuaian harga di tingkat pengecer akibat berkurangnya distribusi stok Minyakita yang masuk ke pasar-pasar tradisional di Pulang Pisau.

Pada November

- Peningkatan Biaya Logistik: Curah hujan yang mulai tinggi di pertengahan bulan menghambat distribusi komoditas dari arah Banjarmasin dan Palangka Raya, meningkatkan ongkos angkut barang ke wilayah pesisir seperti Bahaur.
- Keterbatasan Stok Hortikultura: Pasokan bawang merah dan bawang putih dari luar provinsi mengalami fluktuasi harga akibat gangguan cuaca di daerah sentra produksi asal.

Pada Desember

- Lonjakan Permintaan HBKN: Tekanan inflasi mencapai puncaknya pada minggu ke-3 dan ke-4 didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan libur Tahun Baru.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia
- Rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah
- Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting
- Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait
- Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang
- Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan
- Memberikan bantuan transportasi dari APBD
- Pemberian Rekom BBM Bersubsidi bagi pelaku usaha jasa Transportasi pengangkut

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Pulang Pisau dan koordinasi dengan TPID Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di Kabupaten Pulang Pisau.
- Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi surplus devisa pangan di masing-masing kecamatan.
- Inovasi dalam usaha menstabilisasi harga pangan yang masih kurang

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan serta kelancaran distribusi yang berkelanjutan.
- Melanjutkan program integrasi pertanian terpadu secara berkesinambungan untuk meningkatkan produksi pangan.
- Melanjutkan dan meningkatkan koordinasi antar anggota TPID untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga.
- Terus meningkatkan/memperbaiki jalur distribusi melalui peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antar desa dan kecamatan.
- Pencanaan program-program pengendalian inflasi di Kecamatan- kecamatan